

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini dunia telah memasuki era globalisasi, dimana hubungan saling ketergantungan antar negara dan hubungan sosial antar manusia semakin tidak terbatas. Dengan kaburnya batas-batas teritorial antar negara, menyebabkan perpindahan barang dan jasa terjadi secara masif dan cepat. Didorong dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat, menimbulkan peningkatan tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi dan interdependensi perdagangan antar negara di dunia.¹ Untuk menjawab tantangan perkembangan dunia saat ini, negara-negara di dunia mencoba untuk mempertahankan eksistensinya dengan membentuk kerjasama dengan negara lain.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, telah melakukan berbagai kerjasama di berbagai bidang dengan negara lain. Kerjasama ini kemudian membentuk pola-pola hubungan yang saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh Indonesia adalah kerjasama bilateral. Hubungan bilateral antar negara sering merujuk pada ikatan politik, ekonomi, budaya dan sejarah.² Hubungan bilateral yang kuat ditandai oleh kerjasama antara lembaga dan orang-orang di tingkat

¹Peter Begley. 2006. "The World Is Flat: A Brief History of the Twentieth Century", Diakses dari http://web.archive.org/web/20061106211147/www.credoadvisors.com/blog/wp-content/uploads/The_World_is_Flat_begley.pdf, diakses pada 12 Desember 2019.

²EEA and Norway Grants 2009 – 2014: Guideline for strengthened bilateral relations. Diakses dari www.eeagrants.lv/files/Attachment4-Guideline-for-bilateral-relations_2009-2014_revised-October.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id, diakses pada 12 Desember 2019

administrasi dan politik serta di sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil. Elemen-elemen lain dari hubungan bilateral termasuk perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, serta pengetahuan umum, pemahaman dan kesadaran publik tentang negara lain dan ikatan yang ada di antara mereka.³

Dalam kerjasama bilateral, Indonesia setidaknya telah melakukan 162 kerjasama bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia.⁴ Salah satu mitra kerjasama penting bagi Indonesia adalah Chile. Indonesia dan Chile secara aktif berperan dalam berbagai forum kerjasama internasional, di antaranya Gerakan Non-Blok, APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), dan FEALAC (*Forum for East Asia-Latin America Cooperation*). Untuk menjaga hubungan baik dengan mitra dagangnya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan hubungan perdagangan melalui pembentukan kerjasama perdagangan bebas atau *free trade*. Sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia dan Chile pada tahun 2013 lalu, kedua negara sepakat membentuk sebuah perjanjian perdagangan yang berorientasi pasar bebas dengan menghilangkan hambatan tariff perdagangan kedua negara yang dikenal dengan *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)*.⁵

CEPA adalah skema kerja sama ekonomiyang lebih luas dari hanya sekedar isuperdagangan semata, merupakan persetujuan ekonomi antar negara yang bertujuan meningkatkanperdagangan bilateral antara kedua belah pihak.

³Ibid

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019. Kerja SamaBilateral. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral diakses pada 12 Desember 2019

⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Republik Chile. Chile. Profil Negara dan Kerja sama. Tersedia di<https://kemlu.go.id/santiago/id/read/profil-negara-dan-kerja-sama/54/information-sheet>, diakses pada 12 Desember 2019

CEPA memiliki perbedaan dengan *Free Trade Agreement* (FTA) pada umumnya, dimana CEPA tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan saja, tetapi perjanjian ini mencakup area kerjasama yang jauh lebih luas, seperti investasi, bantuan ekonomi, kerja sama teknologisasi energi terbarukan dan sebagainya sehingga bersifat komprehensif.⁶ Kerjasama IC – CEPA merupakan kerjasama liberalisasi perdagangan yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Selatan.⁷ Dengan diratifikasinya IC – CEPA, maka kedua negara diwajibkan untuk menghapus bea masuk barang-barang yang telah disepakati. Chile menghapus 89,6 persen pos tarif dari seluruh pos tarif Chile. Sementara, Indonesia menghapus 86,1 persen pos tarif dari seluruh pos tarif Indonesia.⁸

Mudahnya proses pembentukan CEPA antara Indonesia dengan Chile tidak terlepas dari hubungan bilateral Indonesia-Chile yang sudah dimulai sejak lama. Indonesia-Chile mengawali hubungan baik dengan dibukanya hubungan kekonsuleran pada tahun 1964 dan hubungan diplomatik secara resmi pada tahun berikutnya.⁹ Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Chile dilakukan dengan berbalas kunjungan dari kedua negara. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengunjungi Chile, Brazil dan Argentina saat akan

⁶Paramitha. 2019. FACTSHEET: INDONESIA – CHILE COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP. Diakses dari http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180523_fact-sheet-indonesia-chile-cepapdf diakses pada 12 Desember 2019

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2019. Roadshow Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement di Bali.. Tersedia di <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/roadshow-indonesia-chile-comprehensive-economic-partnership-agreement-di-bali> diakses pada 12 Desember 2019

⁸Ibid

⁹Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Republik Chile. Loc. Cit

menghadiri KTT OPEC di Venezuela. Sebaliknya, Presiden Chile Ricardo Lagos Escobar membalas kunjungan pada tahun 2000 dan tahun 2004 dalam rangka pertemuan pemimpin APEC.¹⁰ Pada tanggal 9 September 2012, di sela-sela KTT APEC Vladivostok, Rusia, telah dilakukan pertemuan pra-negosiasi IC-CEPA antara Presiden RI dengan Presiden Chile, Sebastian Piñera. Pada pertemuan tersebut, Presiden Piñera berjanji untuk hadir ke Bali pada pertemuan pemimpin ekonomi APEC 2013 dan berharap dapat semakin mempererat kerja sama bilateral disamping memajukan perundingan terkait Comprehensive Economic Partnership Agreement.¹¹

Selanjutnya, *Joint Statement* dan *Term of Reference* (TOR) IC-CEPA ditandatangani oleh kedua negara pada April 2013 di Surabaya. Perundingan putaran pertama dilaksanakan pada Mei 2014 di Santiago, Chile. Namun demikian, perundingan terhenti dikarenakan Indonesia memasuki proses transisi pemerintahan. Perundingan putaran selanjutnya dimulai kembali tahun 2017 dan dilaksanakan secara intensif sehingga berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, yakni pada saat perundingan putaran ke VI tanggal 6-10 November 2017.¹²

Dinamika hubungan Indonesia dan Chile juga diwarnai oleh perdagangan di antara kedua negara. Chile merupakan salah satu negara di Kawasan Amerika

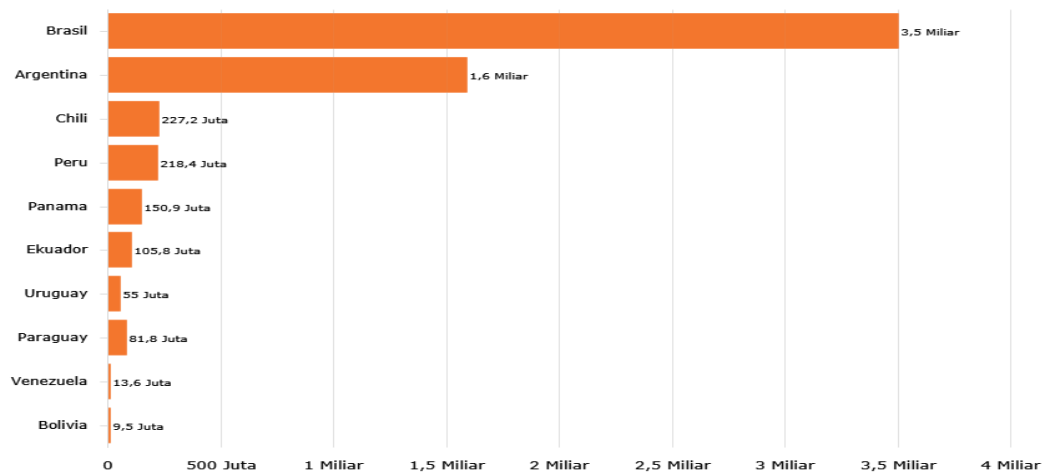
¹⁰Hendri F. Isnaeni, 2018. Hubungan Diplomatik Indonesia – Chile. Terdapat di <https://historia.id/politik/articles/hubungan-diplomatik-indonesia-chile-vZzJL> diakses pada 12 Desember 2019

¹¹Ibid

¹²Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, 2018. INDONESIA-CHILE COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IC-CEPA). Terdapat di <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/amerika> diakses pada 12 Desember 2019

Latin, yang merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga bagi Indonesia di kawasan Amerika Selatan, setelah Brazil dan Argentina.¹³

Gambar 1.1 Perdagangan Indonesia dengan Negara – Negara di Amerika Latin Tahun 2016



Sumber: Databoks.katadata.co.id¹⁴

Dimulai sejak tahun 1970, perdagangan bilateral kedua negara mulai menunjukkan peningkatan yang positif sekitar pertengahan tahun 1990, yang mana pada tahun 1993 total nilai perdagangan antara kedua negara mencapai US\$ 98,7 juta dan naik tajam menjadi US\$ 272,3 juta pada tahun 1997.¹⁵ Namun, hubungan dagang Indonesia dengan Chile juga tidak luput dari permasalahan, yaitu defisit perdagangan yang dialami Indonesia.¹⁶ Selama rentang waktu tahun 1997-2012 perdagangan Indonesia dengan Chile hanya mengalami surplus pada

¹³Paramitha. Op. Cit halaman 5

¹⁴Databoks. 2017. Tingkatkan Ekspor ke Amerika Latin, Indonesia Bermitra dengan Peru. Terdapat di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/22/tingkatkan-ekspor-ke-amerika-latin-indonesia-bermitra-dengan-peru> diakses pada 2 Mei 2020

¹⁵Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Republik Chile, Loc. Cit

¹⁶Sulthon Sabaruddin, & Nugrahaningsih, Hartanti. 2013. Assessing Indonesia-Chile Bilateral Trade Opportunities: A Revealed Comparative Advantage Approach. Economic Journal of Emerging Markets

neraca perdagangan selama 3 tahun di pihak Indonesia, yaitu pada tahun 2001-2003 seperti yang ditunjukkan gambar tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perdagangan Indonesia – Chile Tahun 1997 – 2016 (Juta USD)

TAHUN	EKSPOR RI	IMPOR RI	JUMLAH	NERACA
1997	85.8	186.5	272.3	- 100.7
1998	88.9	109.4	198.3	- 20.5
1999	73.7	88.9	162.6	- 15.3
2000	84.7	109.0	193.8	- 24.3
2001	85.1	57.0	142.2	+ 28.1
2002	66.0	52.1	118.1	+ 13.9
2003	67.8	62.1	129.9	+ 5.7
2004	90.8	110.5	201.2	- 19.7
2005	113.8	135.6	249.5	- 21.8
2006	152.8	197.9	350.7	- 45.1
2007	135.4	202.6	338.1	- 67.2
2008	128.3	274.3	402.6	- 146.0
2009	166.7	189.3	356.0	- 22.4
2010	192.6	309.1	501.7	- 116.5
2011	214.0	372.3	586.3	- 158.3
2012	175.4	206.6	582.0	- 31.2
2013	170.7	241.2	411.9	- 70.5
2014	177.8	241.5	419.3	- 63.7
2015	147.3	173.8	321.1	- 26.5
2016	143.8	83.3	227.1	+ 60.5

Sumber: *Economic Journal of Emerging Markets*¹⁷

Krisis ekonomi global pada 1997-1998 berdampak pada hubungan dagang antara Indonesia dengan Chile, menyebabkan perdagangan antara Indonesia-Chile juga mengalami penurunan.¹⁸ Pada tahun 1997 total perdagangan Indonesia-Chile mencapai US\$ 272,3 juta turun menjadi US\$ 198,3 juta di tahun 1998 dan terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2004. Hubungan perdagangan bilateral mulai kembali pulih sejak 2004, dapat dilihat dari total nilai perdagangan bilateral US\$ 201,2 juta dan pada 2011 mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid

sebesar US\$ 586,3 juta, tetapi pada tahun berikutnya menurun secara signifikan menjadi US\$ 382 juta.

Total perdagangan antara Indonesia dan Chile selama 2008-2012 menunjukkan tren positif, tetapi neraca perdagangan antara Indonesia dan Chile selama 2008-2012 terus mengalami defisit perdagangan di pihak Indonesia, di mana pada tahun 2011 defisit yang dialami Indonesia mencapai US\$ 158,3 juta. Jika ditelusuri kembali satu dekade lalu, Indonesia mengalami defisit perdagangan selama periode 2006 - 2015, sementara hanya pada periode 2016 Indonesia mencatat posisi surplus perdagangan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas dapat dilihat jika perdagangan bilateral antara Indonesia-Chile selalu mengalami defisit di sisi Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia justru menjalin kerjasama pasar bebas dengan Chile. Dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk menganalisis, **“Mengapa Indonesia melakukan kerjasama CEPA dengan Chile?”**

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kepentingan Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Chile melalui sebuah kerjasama bilateral dengan diratifikasinya *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC CEPA)* pada tahun 2017.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Chile dalam bidang ekonomi. Dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang memiliki ketertarikan terhadap ekonomi dan politik Internasional, terutama kerjasama antara Indonesia dan Chile.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Level of Analysis

Menurut Taku Tamaki, *Level Of Analysis* dalam Hubungan Internasional merupakan *starting point* dalam pembelajaran mengenai politik internasional. *Level Of Analysis* memberikan kemudahan untuk memahami berbagai faktor yang mampu mempengaruhi adanya suatu proses pembuatan kebijakan.¹⁹ Selain itu, dengan adanya *Level Of Analysis*, juga memberikan kemudahan dalam memahami bagaimana masing-masing tingkatan level mampu berinteraksi dengan tingkatan satu sama lain.²⁰

Sedangkan John Rourke membagi *Level of Analysis* menjadi tiga tingkatan yaitu *individual level of analysis*, *state level of analysis* dan *system level of analysis*.²¹ *Individual level* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh sifat manusia itu sendiri, yakni perilaku dan karakter

¹⁹ Taku Tamaki. 2015. *The Levels Of Analysis Of The International System Chapter 4 : Introduction*

²⁰ Ibid

²¹ John Rourke. 2007. *International Politics On The World Stage*, Twelfth Edition : *Rourke State Level Analysis Reading.pdf* hlm 78

dalam kepemimpinannya. Maka dari itu, pengambilan keputusan secara rasional kurang terimplementasikan dalam level ini. Pada *State level*, pembuatan kebijakan luar negeri diidentifikasi menjadi beberapa tipe yaitu, *making foreign policy :type of government, situation and policy, making foreign policy: politic culture*, dan *foreign policy-making actors*.²² Dan yang terakhir adalah *System level*, yakni tingkatan yang menganalisis karakteristik struktural, adanya hubungan *power*, pola ekonomi hingga norma yang ada dalam sebuah sistem pemerintahan.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peringkat analisis negara (*state level of analysis*), karena penelitian ini berfokus mengenai kepentingan Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Chile.

1.5.2 Landasan Pemikiran

1.5.2.1 Teori Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional, kerjasama internasional menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kerjasama internasional, negara akan bertemu dengan berbagai macam kepentingan nasional, dari berbagai negara dan bangsa, yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri.²⁴ Karena dengan melakukan kerjasama berbagai macam kebutuhan yang tidak dimiliki oleh satu negara dapat terpenuhi dengan melakukan kerjasama dengan negara yang lain.

²² Ibid, hlm 79

²³ John Rourke dalam Sylvia Putri. *Diplomasi Hubungan Internasional di Kawasan Asia Pasifik*. Diakses dari <http://kepo.unikom.ac.id/35875/1/Diplomasi%20Asia%20Pasifik%203> diakses pada 19 April 2017

²⁴ A. A.Perwita, & Y.M.Yani (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.²⁵ Artinya bahwa dengan melakukan kerjasama internasional dapat terbentuk kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai macam masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.²⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa kerjasama internasional dapat terbentuk berdasarkan bidangnya. Selain itu, kerjasama internasional juga dapat terbentuk berdasarkan sifatnya. Kerjasama internasional berdasarkan bidangnya terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Sedangkan, kerjasama internasional berdasarkan sifatnya dapat berupa kerjasama bilateral atau kerjasama antar dua pihak; kerjasama trilateral atau kerjasama antar tiga pihak; dan kerjasama multilateral atau kerjasama antar dua atau lebih pihak.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kerjasama pada bidang ekonomi dan memfokuskan sifat kerjasama berdasarkan kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Chile.

²⁵Ibid

²⁶Ibid

²⁷Ibid

Hubungan bilateral ekonomi diperlukan untuk mencapai sebuah keunggulan dan kesejahteraan suatu negara. Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan dalam buku Kamus Hubungan Internasional jika hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dapat juga disebut *bilateral trade* atau perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral merupakan upaya pengembangan kerja sama dua negara dalam bidang perdagangan dan kegiatan ekonomi. Plano dan Olton juga menjelaskan bahwa, hubungan bilateral ekonomi yang paling umum digunakan oleh negara adalah dalam bentuk perjanjian perdagangan dengan saling mengurangi bea tariff masuk dan hambatan perdangan lainnya.²⁸

Dalam melakukan kerjasama internasional, terdapat motif yang menjadi alasan aktor-aktor melakukan kerjasama internasional. Adapun motif yang dilakukan suatu negara untuk melakukan kerjasama internasional dengan negara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan negaranya atau kepentingan nasional, untuk mendorong perekonomian, dan untuk memelihara perdamaian. Selain itu, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena dengan bekerjasama dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara. Kerjasama internasional juga dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara maka diperlukan suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam konstelansi hubungan internasional.

²⁸ J. C. Plano, & R. Olton, 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: CV. Abardin.

Terkait dengan penjelasan dari kerjasama internasional, secara sederhana dijelaskan bahwa kerjasama internasional dapat diartikan merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk saling membantu dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama untuk menjaga perdamaian dan mempererat hubungan satu dengan yang lainnya.

1.5.2.2 Konsep *New Trade Strategy*

Konsep strategi perdagangan baru merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Aggarwal dan Lee. Konsep ini menjelaskan dinamika ekonomi domestik *versus* preferensi perjanjian perdagangan yang memengaruhi negara-negara yang telah mengembangkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Dalam konsep ini, terdapat tiga variabel sebagai kunci pembentukan strategi perdagangan baru, yaitu ide, minat, dan institusi domestik.²⁹

Pertama, persepsi dan ide yang dipegang oleh aktor utama karena mereka membantu pembuat kebijakan dan aktor lain mengidentifikasi dan menginterpretasikan sifat dari perubahan eksternal, yang menunjukkan bahwa pilihan strategi perdagangan tertentu bukanlah respon otomatis terhadap perubahan eksternal.³⁰ Dalam menafsirkan perubahan eksternal dan merumuskan kebijakan terdapat sebuah motivasi defensif, yang berkaitan dengan reformasi ekonomi dan pembaharuan strategi kebijakan perdagangan sebagai aspek yang mempengaruhi hubungan bilateral di dalam perjanjian pasar bebas. Motivasi

²⁹ V.K. Aggarwal and Lee, S. (eds) (2011), *Trade Policy in the Asia-Pacific: The Role of Ideas, Interests, and Domestic Institutions*, New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer

³⁰Ibid

defensif merupakan sebuah reaksi terhadap cepatnya tren proliferasi perjanjian pasar bebas di berbagai kawasan yang apabila suatu negara tidak mengambil bagian dari proses tersebut maka akan tertinggal dan kurang mendapatkan keuntungan dibanding dengan kompetitornya.³¹ Dengan adanya motivasi defensif memberikan dorongan bagi para pembuat keputusan untuk menjalin kerjasama perdagangan yang lebih bebas sebagai respon terhadap dinamika perubahan dunia.

Kedua, penting untuk memeriksa bagaimana pemain utama dengan minat yang dikonfigurasi ulang menyatu dalam strategi perdagangan baru.³² Mengingat bahwa perubahan dalam lingkungan eksternal memengaruhi minat pemain domestik, maka perlu untuk mengidentifikasi pemain domestik yang terlibat dalam merumuskan strategi perdagangan. Pengamatan perusahaan dan pelaku bisnis sebagai sumber kebijakan ekonomi luar negeri, memberikan perspektif analitis yang berguna mengingat bahwa pembentukan strategi perdagangan baru biasanya dibatasi oleh kepentingan actor nasional yang saling bertentangan. Untuk itu, perlu adanya pengamatan tentang bagaimana industri dengan minat yang berbeda mengkonfigurasi ulang preferensi mereka tentang strategi perdagangan baru. Misalnya, industri yang kompetitif secara global dan berorientasi ekspor harus memiliki preferensi kebijakan yang berbeda dari industri pesaing impor berorientasi domestik. Sifat dan ruang lingkup strategi perdagangan baru akan mencerminkan keseimbangan politik antara kedua kubu yang berseberangan ini.

³¹Ibid

³²Ibid

Ketiga, kami memeriksa fitur kelembagaan domestik terkait dengan strategi perdagangan seperti poin *veto*, struktur pembuatan kebijakan pemerintah, dan oposisi yang dilembagakan untuk menganalisis bagaimana perubahan eksternal dan kepentingan yang diatur ulang disalurkan dalam proses pembuatan kebijakan domestik.³³ Untuk memeriksa variasi lintas-nasional di lembaga-lembaga domestik, kami fokus pada poin-poin berikut: (1) poin veto; (2) struktur pembuatan kebijakan formal; dan (3) kehadiran kelompok kepentingan terorganisir.³⁴ Pemeriksaan poin veto dapat menjadi alternatif untuk analisis struktur pembuatan kebijakan perdagangan masing-masing negara. Dengan mencari tahu jumlah pemain veto, seseorang dapat secara efektif membandingkan dampak kelembagaan pada perumusan strategi perdagangan baru. Sejumlah kecil pemain veto akan menghasilkan perubahan kebijakan yang drastis, sementara sejumlah besar pemain veto akan mengarah pada pemeliharaan *status quo*, memperkuat kepentingan pribadi. Di bawah struktur kelembagaan dengan jumlah kecil dari poin veto, pemerintah dan aktor swasta akan merasa lebih mudah untuk membangun strategi perdagangan baru yang secara fundamental berbeda dari yang sebelumnya. Sementara itu, banyak pemain veto cenderung menghasilkan kemacetan institusional yang menghambat perubahan drastis dalam strategi perdagangan, bahkan jika pemain yang kuat secara politik mendukung strategi baru.

Selanjutnya, analisis poin veto perlu dilengkapi dengan analisis struktur pembuatan kebijakan perdagangan karena yang terakhir akan memandu kita untuk

³³Ibid

³⁴Ibid

memahami pemain mana - pemerintah dan aktor swasta - yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, proses dan cara di mana para pemain ini berinteraksi satu sama lain untuk merumuskan strategi perdagangan baru.³⁵ Jika banyak kementerian pemerintah dan aktor politik terlibat dalam merumuskan strategi perdagangan, struktur pembuatan kebijakan perdagangan formal akan terfragmentasi. Dalam hal ini, menetapkan perubahan mendasar dari strategi perdagangan yang ada menjadi sulit, dan pembentukan strategi perdagangan baru harus dilanjutkan secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Selain itu, kelumpuhan institusional ini lebih cenderung memicu intervensi politisi dalam strategi perdagangan. Sebaliknya, struktur pembuatan kebijakan yang sangat terpadu dimana otoritas pembuat kebijakan terpusat membantu membangun strategi perdagangan baru yang sangat berbeda. Di bawah struktur kelembagaan ini, aktor-aktor terkait mengoordinasikan kepentingan yang saling bertentangan dan pandangan yang berbeda dengan relatif mudah sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi perdagangan yang koheren dan melakukan negosiasi perdagangan dengan negara-negara asing tanpa hambatan serius.

Berdasarkan Aggarwal dan Lee³⁶, persepsi tentang perubahan lingkungan eksternal mendorong pemain utama untuk memikirkan kembali efektifitas strategi yang sudah ada, dan membuka jalan bagi ide-ide alternatif. Tiga faktor sangat penting dalam menjelaskan transisi ini: motif defensif, gagasan menghubungkan FTA dengan reformasi ekonomi, dan pemahaman baru tentang FTA. Sementara motif defensif adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh setiap negara-negara di

³⁵Ibid

³⁶Ibid

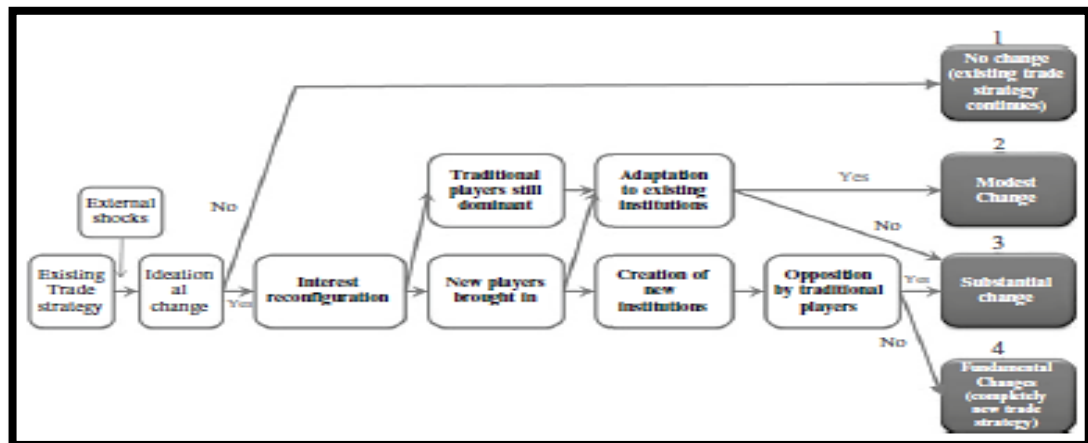
dunia, dua item terakhir memiliki dampak yang berbeda, yang telah menghasilkan variasi dalam strategi perdagangan antar negara.

Pertimbangan faktor domestik terdiri dari motivasi defensif, yang berkaitan dengan reformasi ekonomi dan memperbaharui strategi kebijakan perdagangan sebagai aspek yang mempengaruhi hubungan bilateral di dalam perjanjian pasar bebas. Motivasi defensif merupakan reaksi terhadap cepatnya tren proliferasi perjanjian pasar bebas di berbagai kawasan yang apabila suatu negara tidak mengambil bagian dari proses tersebut maka akan tertinggal dan kurang mendapatkan keuntungan dibanding dengan kompetitornya.³⁷

Kebijakan liberalisasi perdagangan sebagai hasil dari interaksi hubungan antara aktor domestik dan global dalam proses inisiasi yang sangat menentukan. Integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas secara bilateral menawarkan berbagai peluang bagi dunia usaha, sekaligus tantangan dampak negatif bagi ekonomi domestik. Bilateralisme dimaknai positif dan optimis dapat menciptakan pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi. Perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dapat dilihat strategi kebijakan diplomasi perdagangan bagi upaya mendorong kepentingan ekonomi dalam kompetisi perdagangan global.

³⁷Ibid

Gambar 1.2 Skema Dinamika Pembentukan Strategi Baru (Aggarwal dan Lee)



Sumber: Trade Policy in the Asia-Pacific: The Role of Ideas, Interests, and Domestic Institutions³⁸

Gambar di atas merupakan gambaran bagaimana interaksi antara ide, minat dan institusi yang digambarkan oleh Aggarwal dan Lee. Saat terjadi perubahan di dunia internasional, maka akan mempengaruhi kinerja domestic suatu negara maka perlu adanya perubahan pada strategi lama dalam upaya penyesuaian dengan keadaan saat ini. Perubahan tersebut kemudian didorong dengan kemunculan sebuah ide baru oleh seorang kepala negara. Dengan melihat perubahan yang terjadi di dunia, kepala negara akan melakukan koordinasi dengan para menteri untuk membuat sebuah langkah strategis berdasarkan perubahan yang terjadi di dunia.

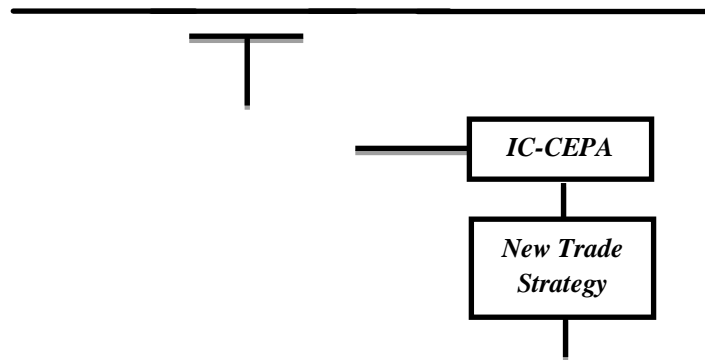
Dengan munculnya ide rencana strategis baru, akan membuka jalan bagi para pemangku kepentingan domestik untuk merubah minat dan cara pandang dalam melakukan kegiatan mereka. Saat proses pergeseran minat seperti ini aka

³⁸Ibid

nada dua kemungkinan, pertama jika langkah strategis pemerintah memiliki kekuatan yang kuat dalam mempengaruhi minat pemangku kepentingan, maka akan terjadi perombakan menyeluruh pada strategi perdagangan yang lama. Sedangkan jika langkah pemerintah dalam mendorong perubahan minat gagal, maka strategi lama akan tetap dipertahankan.

Saat telah terjadi pergeseran minat dari para pemangku kepentingan, selanjutnya akan terjadi perubahan dalam interaksi domestik. Perubahan yang terjadi antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan biasanya akan melemah setelah penerapan strategi baru, sehingga terjadi oposisi terhadap kebijakan strategi baru dan memunculkan aktor kepentingan baru yang menuntut penyesuaian dengan kepentingan mereka. Saat hal tersebut terjadi maka, akan terjadi perubahan besar pada struktur domestik yang menghasilkan sebuah kebijakan strategi perdagangan yang benar-benar baru. Sedangkan saat tidak terjadi penolakan terhadap ide mengenai strategi baru, maka tidak akan terjadi perubahan yangterlalu signifikan terhadap struktur domestik sehingga kebijakan strategi perdagngan yang baru tidak sepenuhnya baru.

1.5.3 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan di atas, Indonesia dan Chile menjalin sebuah interaksi, yang dijelaskan dengan teori kerjasama internasional sebagai sebuah bentuk kerjasama pada level bilateral. Teori kerjasama internasional, kemudian diperkuat oleh teori keunggulan kompetitif dan *new trade strategy*. Teori keunggulan kompetitif dan *new trade strategy* digunakan untuk menganalisa kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Chile. Sehingga berdasarkan analisa landasan teori tersebut didapatkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang ingin dicapai.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori di atas peneliti mengambil hipotesis bahwa, Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan Chile untuk membentuk pasar bebas melalui kerjasama bilateral. Pembentukan pasar bebas dengan Chile digunakan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk

membangun kebijakanstrategi perdagangan yang baru dalam mendorong kepentingan ekonomi Indonesia.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1.1 Kepentingan Ekonomi

Pernyataan dasar dari kepentingan ekonomi menurut Nuechterlein adalah, meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui hubungan dengan negara lain dan memperluas eksistensi ekonomi dengan mempromosikan produk-produk (hasil pertanian, kerajinan, manufaktur, minyak, gas, senjata, dan sebagainya) ke luar negeri yakni bilateral maupun multilateral untuk menjamin kepentingan ekonomi.³⁹Merujuk pada kepentingan dalam hal ekonomi, Nuechterlein memberikan sebuah faktor kepentingan nasional yang memperkuat motivasi suatu negara memikirkan masalah yang terjadi di luar dari negaranya. Di sini terdapat delapan faktor, namun yang mengarah ke sebuah kepentingan ekonomi hanya satu yakni *Economic Stake* dan proposisi dasarnya ialah, perdagangan dan investasi suatu negara di negara lain mengkondisikan pandangannya tentang kepentingannya. Ketika negara-negara lebih bersedia mengambil langkah-langkah kuat untuk melindungi keuntungan ekonominya di luar negeri.⁴⁰

³⁹ Ibid

⁴⁰ Donald E. Nuechterlein. 1976. "A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making". Dalam *National Interest and Foreign Policy, Great Britain: Cambridge University Press, 1976*. Hal.254

Secara operasional dalam penelitian ini kepentingan ekonomi dilakukan Indonesia dengan menjalin hubungan bilateral dengan Chile untuk memperluas kesempatan meningkatkan perdagangan dan investasi, pada tingkat bilateral.

1.7.1.2 Perdagangan Bebas

Secara konseptual, perdagangan bebas yang didasarkan pada argumen Adam Smith mengatakan bahwa pembagian kerja di antara negara-negara mengarah pada spesialisasi, efisiensi yang lebih besar, dan produksi agregat yang lebih tinggi.⁴¹Perdagangan bebas secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan teoritis di mana pemerintah sama sekali tidak mengenakan tarif, pajak, atau bea atas impor, atau kuota untuk ekspor. Dalam hal ini, perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme, kebijakan perdagangan defensif yang dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan persaingan asing. Secara operasional, dalam penelitian ini didasarkan pada pembuatan perjanjian IC – CEPA sebagai landasan dalam penghapusan hambatan perdagangan antara Indonesia dengan Chile.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini, hubungan sebab akibat yang coba untuk dijelaskan adalah faktor-faktor yang

⁴¹Free Trade. Encyclopedia Britanica. Terdapat di <https://www.britannica.com/topic/free-trade> diakses pada 12 Januari 2020

mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Chile dalam kerangka pasar bebas IC-CEPA.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan jangkauan penelitian pada tahun 2013-2017. Pada 2013 pemerintah Indonesia dan Chile sepakat untuk mengadakan IC – CEPA dengan menandatangani *Joint Statement Term of Reference (TOR)* dan pada 2017 perjanjian kerjasama IC CEPA telah diratifikasi oleh kedua negara.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴²Data primer yaitu data berupa objek ataupun dokumen asli yang didapat langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika peristiwa itu terjadi. Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti, dimana data yang diperoleh berasal dari tangan kedua. Sehingga data ini berasal dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelumnya. Contoh dari data sekunder adalah artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi pemerintah.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, bahan-bahan *soft copy* dari internet, dan bahan-bahan lainnya.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 137.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan penulis adalah analisa data kualitatif. Penulis mengumpulkan beberapa sumber seperti jurnal, artikel, buku dan karya sejenis lainnya, lalu dianalisa sehingga dapat menjadi suatu penelitian yang dapat dibuktikan keempirisannya. Data yang didapat oleh penulis didapatkan dari berbagai sumber yang terpercaya.

1.7.6 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran yang terdiri dari, peringkat analisis dan landasan teori yang digunakan sebagai kerangka menganalisis permasalahan dan menjawab rumusan masalah, hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian ini. Serta terdapat metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran alur penulisan bab-bab berikutnya.

BAB II yaitu peneliti menyajikan latar belakang negara Chile dan Indonesia, mulai dari keadaan ekonomi hingga kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Chile.

BAB III Peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian, tentang kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama CEPA dengan Chile.

BAB IV Penutup dan Kesimpulan.